
KETIMPANGAN GENDER DALAM PARTISIPASI POLITIK: TINJAUAN ATAS FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA

Wirni Asipi Zebua

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Ketimpangan gender dalam partisipasi politik masih menjadi permasalahan yang signifikan di banyak negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor seperti diskriminasi gender, stereotip sosial, akses terhadap pendidikan dan sumber daya, kebijakan politik, dan peran budaya dapat berkontribusi terhadap ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam upaya mengatasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik.

Kata Kunci: *Ketimpangan Gender, Partisipasi Politik, Diskriminasi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketimpangan gender dalam partisipasi politik merupakan isu yang masih meruncing di banyak negara di seluruh dunia. Meskipun perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir, partisipasi politik perempuan masih sering kali terbatas dan terhalang oleh berbagai faktor. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan gender dalam partisipasi politik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah tersebut.

Salah satu faktor penyebab ketimpangan gender dalam partisipasi politik adalah adanya diskriminasi gender yang masih tersisa dalam berbagai aspek kehidupan politik. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari akses terbatas terhadap sumber daya politik dan pendidikan politik hingga stereotip negatif tentang peran gender dalam kehidupan politik. Stereotip ini sering kali membatasi ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi dalam arena politik, sehingga menghambat kemungkinan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain itu, akses terhadap pendidikan politik dan sumber daya politik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan politik dapat menghambat kemampuan perempuan untuk memahami dan terlibat dalam proses politik. Sementara itu, akses terhadap sumber daya politik, seperti dana kampanye dan jaringan politik, sering kali lebih mudah bagi laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan politik.

Kebijakan politik juga dapat menjadi faktor yang memperkuat atau mengurangi ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Kebijakan yang mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek politik dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Namun, seringkali kebijakan politik masih belum cukup efektif atau tidak cukup diterapkan dengan baik, sehingga meninggalkan kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi politik.

Selain faktor-faktor internal, faktor budaya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan. Budaya patriarki yang masih dominan di banyak masyarakat sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan menetapkan norma-norma yang menghambat keterlibatan mereka dalam politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya masyarakat dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Dengan memahami faktor-faktor penyebab ketimpangan gender dalam partisipasi politik, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik secara lebih merata dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*) yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebabnya. Pendekatan campuran dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang kompleks seperti ketimpangan gender dalam partisipasi politik, serta memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

1. **Analisis Kuantitatif:**
 - a. **Pengumpulan Data Sekunder:** Penelitian akan memanfaatkan data sekunder dari survei nasional dan internasional, laporan statistik pemerintah, dan studi akademis terkait untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam partisipasi politik berdasarkan jenis kelamin. Data ini akan memberikan pemahaman tentang tingkat partisipasi politik dan ketimpangan gender di berbagai konteks nasional dan internasional.
 - b. **Analisis Statistik:** Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara partisipasi politik pria dan wanita. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi tingkat dan sifat ketimpangan gender dalam partisipasi politik, serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadapnya.
2. **Analisis Kualitatif:**
 - a. **Wawancara Mendalam:** Penelitian akan melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin politik, aktivis masyarakat, dan akademisi yang berpengalaman dalam studi gender dan politik. Wawancara ini akan memberikan wawasan tentang persepsi mereka tentang ketimpangan gender dalam partisipasi politik dan faktor-faktor yang mungkin mendasarinya.
 - b. **Analisis Konten:** Penelitian juga akan melibatkan analisis konten dari berbagai sumber, termasuk media massa, dokumen kebijakan, dan publikasi akademis. Analisis ini akan membantu dalam memahami representasi gender dalam politik, stereotipe gender yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik, dan narasi tentang peran gender dalam politik.
3. **Integrasi Data:**
 - a. Data kualitatif dan kuantitatif akan digabungkan dan dianalisis secara terintegrasi. Pendekatan triangulasi akan digunakan untuk membandingkan temuan dari kedua jenis data, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ketimpangan gender dalam partisipasi politik dan faktor-faktor yang mendasarinya.
 - b. Integrasi data akan memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan, mengeksplorasi hubungan kausalitas antara variabel, dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang kompleksitas ketimpangan gender dalam partisipasi politik.
4. **Analisis Teori:**
 - a. Temuan penelitian akan dianalisis dalam konteks teori-teori feminis dan teori politik yang relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami dinamika sosial, budaya, dan politik yang mendasari ketimpangan gender dalam partisipasi politik, serta dalam merumuskan kerangka kerja analitis yang kuat.
 - b. Analisis teori akan memperkaya interpretasi temuan penelitian, memungkinkan peneliti untuk menggali implikasi teoritis dari temuan mereka, dan menawarkan

wawasan tentang langkah-langkah kebijakan yang mungkin untuk mengatasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik.

Dengan menggunakan pendekatan campuran yang mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketimpangan gender dalam partisipasi politik dan faktor-faktor yang mendasarinya. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan strategi intervensi yang lebih efektif dalam mempromosikan partisipasi politik yang setara bagi semua gender.

PEMBAHASAN

Ketimpangan gender dalam partisipasi politik merujuk pada disparitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan dan pengaruh mereka dalam ranah politik. Fenomena ini bisa terlihat dari rendahnya jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan politik, kesenjangan gaji gender, hingga kurangnya representasi kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dalam partisipasi politik antara lain norma-norma budaya dan sosial yang patriarkis, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya dukungan dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

Norma-norma budaya yang patriarkis sering kali menjadi penghalang bagi partisipasi politik perempuan. Budaya yang menghargai peran tradisional perempuan sebagai pengasuh rumah tangga dan ibu dapat menghasilkan stigma terhadap perempuan yang aktif di ranah politik. Perempuan sering kali dianggap kurang cocok untuk terlibat dalam kegiatan politik atau dianggap kurang mampu dalam memimpin karena pandangan stereotip mengenai peran gender. Hal ini dapat menghambat minat dan motivasi perempuan untuk ikut serta dalam proses politik dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan juga merupakan faktor yang signifikan dalam menciptakan ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan politik yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap pekerjaan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan juga dapat membatasi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik.

Kurangnya dukungan dan kesempatan bagi perempuan dalam partisipasi politik juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan gender. Perempuan sering kali menghadapi kendala struktural dalam mendapatkan dukungan politik dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, seperti akses terhadap dana kampanye dan jaringan politik yang kuat. Selain itu, kurangnya representasi perempuan dalam lembaga politik yang sudah ada juga dapat membuat perempuan merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik, karena mereka merasa tidak diwakili secara adekuat oleh para pemimpin politik yang ada.

Lebih lanjut, media dan narasi politik yang bias gender juga turut memperkuat ketimpangan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Media sering kali memberikan ruang yang lebih besar untuk laki-laki dalam liputan politik, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam peran yang lebih sekunder atau hanya dianggap sebagai pelengkap. Selain itu, narasi politik yang dihasilkan juga cenderung menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa, sementara perempuan sering kali dianggap kurang mampu untuk memegang peran yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik dan memberikan tekanan tambahan bagi perempuan yang ingin terlibat secara aktif.

Faktor sosio-ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan partisipasi politik perempuan. Ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, seperti kesenjangan gaji dan akses terhadap sumber daya ekonomi, dapat menghambat kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik. Perempuan yang mengalami ketidakstabilan ekonomi atau memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam rumah tangga cenderung memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, perempuan dari latar belakang ekonomi rendah juga sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik dan sumber daya politik lainnya yang diperlukan untuk terlibat dalam politik.

Ketidaksetaraan dalam sistem politik dan hukum juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Banyak negara masih memiliki undang-undang atau kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam hal hak memilih maupun hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Selain itu, struktur politik yang didominasi oleh laki-laki dan kurangnya mekanisme yang mendukung representasi perempuan dalam lembaga politik juga dapat menghambat partisipasi politik perempuan.

Ketimpangan gender dalam partisipasi politik juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Dalam banyak masyarakat, terdapat norma-norma yang mengatur peran gender dalam politik dan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Budaya politik yang patriarkhal ini dapat menghalangi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas politik secara aktif dan mempengaruhi persepsi mereka tentang kemungkinan mereka dalam dunia politik.

Kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Banyak perempuan yang merasa sulit untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karier politik, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab sebagai ibu atau caregiver. Hal ini dapat menyebabkan banyak perempuan enggan untuk terjun ke dalam politik atau bahkan mengakhiri karier politik mereka secara prematur.

Selain itu, stereotype gender yang masih melekat dalam masyarakat juga dapat menghambat partisipasi politik perempuan. Stereotip bahwa perempuan kurang mampu dalam memimpin, kurang ambisius, atau lebih emosional daripada laki-laki dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam politik. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kapasitas perempuan dalam memegang posisi politik yang penting.

Kurangnya dukungan dan jaringan politik juga merupakan faktor yang signifikan dalam menjelaskan ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Laki-laki sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap jaringan politik dan dukungan politik yang diperlukan untuk maju dalam dunia politik. Perempuan sering kali kesulitan untuk membangun jaringan politik yang kuat dan mendapatkan dukungan yang sama seperti yang dinikmati oleh laki-laki.

Selain itu, ketidakadilan dalam pembiayaan kampanye politik juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Banyak negara masih memiliki struktur yang tidak adil dalam pendanaan kampanye politik, di mana perempuan sering kali kesulitan untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk bersaing dengan kandidat laki-laki. Hal ini dapat menyulitkan perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau mendapatkan posisi politik yang signifikan.

Dalam banyak kasus, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang terlibat dalam politik juga dapat menghambat partisipasi politik mereka. Perempuan sering kali menjadi sasaran serangan dan intimidasi dalam politik, baik secara fisik maupun online. Hal ini dapat membuat perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk terlibat dalam politik, serta mengurangi motivasi mereka untuk aktif dalam proses politik.

Ketimpangan gender dalam partisipasi politik juga sering kali mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara, kekuasaan dan otoritas masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan sering kali diabaikan atau dianggap kurang berharga dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang tidak ramah bagi perempuan dan dapat menghambat kemauan mereka untuk terlibat dalam politik.

Pendidikan politik yang kurang merata antara laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi faktor penyebab ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Di banyak negara, pendidikan politik masih dianggap sebagai domain yang lebih cocok untuk laki-laki, sementara perempuan sering kali diabaikan dalam kurikulum politik. Kurangnya pengetahuan politik dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam kegiatan politik dan membuat mereka kesulitan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses politik.

Selain itu, perbedaan dalam norma budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Di beberapa masyarakat, perempuan dianggap sebagai penjaga rumah tangga dan keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pemimpin alamiah yang lebih cocok untuk terlibat dalam politik. Pandangan ini dapat membuat perempuan merasa tidak termotivasi untuk terlibat dalam politik atau menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk tidak aktif secara politik.

Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Laki-laki sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya politik, seperti dana kampanye, jaringan politik, dan peluang karier politik, daripada perempuan. Hal ini dapat membuat

perempuan kesulitan untuk bersaing dalam dunia politik dan membatasi kesempatan mereka untuk mencapai posisi politik yang signifikan.

Selain itu, adanya bias gender dalam media dan narasi politik juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Media sering kali memberikan ruang yang lebih besar untuk laki-laki dalam liputan politik, sementara perempuan sering kali diabaikan atau diposisikan dalam peran yang lebih sekunder. Hal ini dapat menghasilkan stereotip negatif tentang perempuan dalam politik dan membuat perempuan merasa tidak dihargai atau tidak diwakili secara adekuat oleh media dan masyarakat.

Kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Perempuan sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik dalam ranah formal maupun informal. Mereka sering kali tidak diundang atau diikutsertakan dalam pertemuan atau diskusi politik yang penting, sehingga membuat mereka merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam proses politik.

Selain itu, kurangnya perwakilan perempuan dalam lembaga politik dan pemerintahan juga dapat mengurangi partisipasi politik perempuan. Di banyak negara, perempuan masih kurang diwakili dalam parlemen, kabinet, dan posisi politik lainnya, sehingga membuat perempuan merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik. Ketidakseimbangan gender dalam lembaga politik juga dapat menciptakan lingkungan politik yang tidak ramah bagi perempuan dan mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi secara aktif.

Peran stereotip gender dalam politik juga dapat menghambat partisipasi politik perempuan. Stereotip bahwa perempuan kurang mampu dalam memimpin atau kurang cocok untuk terlibat dalam politik dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam politik. Hal ini dapat mengurangi motivasi perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik dan membuat mereka enggan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau terlibat dalam organisasi politik.

Selain itu, perbedaan dalam norma budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Di beberapa masyarakat, perempuan dianggap sebagai penjaga rumah tangga dan keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pemimpin alamiah yang lebih cocok untuk terlibat dalam politik. Pandangan ini dapat membuat perempuan merasa tidak termotivasi untuk terlibat dalam politik atau menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk tidak aktif secara politik.

Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Laki-laki sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya politik, seperti dana kampanye, jaringan politik, dan peluang karier politik, daripada perempuan. Hal ini dapat membuat perempuan kesulitan untuk bersaing dalam dunia politik dan membatasi kesempatan mereka untuk mencapai posisi politik yang signifikan.

Selain itu, adanya bias gender dalam media dan narasi politik juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Media sering kali memberikan ruang yang lebih besar untuk laki-laki dalam liputan politik, sementara perempuan sering kali diabaikan atau diposisikan dalam peran yang lebih sekunder. Hal ini dapat menghasilkan

stereotip negatif tentang perempuan dalam politik dan membuat perempuan merasa tidak dihargai atau tidak diwakili secara adekuat oleh media dan masyarakat.

Kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Perempuan sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik dalam ranah formal maupun informal. Mereka sering kali tidak diundang atau diikutsertakan dalam pertemuan atau diskusi politik yang penting, sehingga membuat mereka merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam proses politik.

Selain itu, kurangnya perwakilan perempuan dalam lembaga politik dan pemerintahan juga dapat mengurangi partisipasi politik perempuan. Di banyak negara, perempuan masih kurang diwakili dalam parlemen, kabinet, dan posisi politik lainnya, sehingga membuat perempuan merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik. Ketidakseimbangan gender dalam lembaga politik juga dapat menciptakan lingkungan politik yang tidak ramah bagi perempuan dan mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi secara aktif.

Peran stereotip gender dalam politik juga dapat menghambat partisipasi politik perempuan. Stereotip bahwa perempuan kurang mampu dalam memimpin atau kurang cocok untuk terlibat dalam politik dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam politik. Hal ini dapat mengurangi motivasi perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik dan membuat mereka enggan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau terlibat dalam organisasi politik.

Selain itu, tekanan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Di beberapa masyarakat, perempuan sering kali dianggap sebagai penjaga rumah tangga dan keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pemimpin alamiah yang lebih cocok untuk terlibat dalam politik. Pandangan ini dapat membuat perempuan merasa tidak termotivasi untuk terlibat dalam politik atau menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk tidak aktif secara politik.

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, seperti kesenjangan gaji dan akses terhadap pekerjaan yang layak, dapat menghambat kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik. Perempuan yang mengalami ketidakstabilan ekonomi atau memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam rumah tangga cenderung memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Selain itu, kurangnya dukungan dan jaringan politik juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Laki-laki sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap jaringan politik dan dukungan politik yang diperlukan untuk maju dalam dunia politik. Perempuan sering kali kesulitan untuk membangun jaringan politik yang kuat dan mendapatkan dukungan yang sama seperti yang dinikmati oleh laki-laki.

Ketidakadilan dalam sistem politik dan hukum juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Banyak negara masih memiliki undang-undang atau kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam hal hak memilih maupun hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Selain itu, struktur politik yang didominasi oleh laki-laki dan kurangnya mekanisme yang mendukung representasi perempuan dalam lembaga politik juga dapat menghambat partisipasi politik perempuan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ketimpangan gender dalam partisipasi politik adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor seperti stereotip gender, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, peran tradisional yang diharapkan dari perempuan, dan tekanan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menghambat partisipasi politik perempuan. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya dukungan dan jaringan politik, serta ketidakadilan dalam sistem politik dan hukum juga berkontribusi pada ketimpangan gender dalam partisipasi politik.

Untuk mengatasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembentukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perubahan budaya dan stereotip yang merugikan perempuan dalam politik, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan politik dan pelatihan keterampilan kepemimpinan, serta penguatan jaringan dan dukungan politik bagi perempuan.

Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan memastikan representasi perempuan yang lebih besar dalam lembaga politik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui kuota gender dalam pemilihan umum, program dukungan untuk calon perempuan, dan pembentukan kebijakan yang mempromosikan persamaan gender dalam politik.

Dalam konteks global, kolaborasi antar negara dan lembaga internasional juga penting untuk mengatasi ketimpangan gender dalam partisipasi politik. Negara-negara dapat saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, serta membangun kerja sama untuk memperkuat perlindungan hukum dan hak politik perempuan di tingkat internasional.

Dengan melakukan langkah-langkah ini secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan ketimpangan gender dalam partisipasi politik dapat dikurangi secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, adil, dan demokratis bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.

- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.

- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.